

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Oleh : **Muhammad Aldo Saputra**

Aldo09.saputra@gmail.com

Pebimbing : Febri Yuliani

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/fax 0761-63272

Abstract

This thesis research is located in the Department of Housing, Settlement and Land in Bengkalis Regency. The purpose of this thesis is to find out and describe the extent of the Implementation of the Program for the Construction of Livable Houses in the District of Mandau. The focus of research in this study consisted of elements of the implementer, the program carried out and the target groups as well as the factors that hampered the Implementation of the Livable Houses Program in Mandau District, Bengkalis Regency.

Data collection techniques carried out by means of library research and field research consisting of observations, interviews and documentation, while the informants were taken by purposive sampling. This type of research is descriptive and will be analyzed qualitatively.

From the research results it is known that the Implementation of the Livable Living Program in the District of Mandau is quite good with a long process starting from the planning, implementation, survey and completion of activities carried out by the implementer in the village, sub-district to district and community beneficiaries. With a significant change from the houses of the beneficiaries, the Occupied Housing Program.

Keywords: Implementation, Programs, Livable Houses

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tinggal di kawasan yang kumuh dan juga dirumah yang dikatakan tidak layak untuk ditempati. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Dalam menghadapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia membuat program bantuan berupa rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan dilaksanakan disetiap daerah di Indonesia.

Hal ini tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman dalam pasal 54 bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) rumah dapat dikatakan layak huni bila memenuhi empat faktor atau kriteria yaitu :

1. Struktur konstruksi yang kuat.
2. Luas bangunan.
3. Sanitasi yang baik.
4. Serta tersedianya air bersih.

Dan salah satu Kabupaten yang melaksanakan program tersebut

adalah Kabupaten Bengkalis, hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan program rumah layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar, yaitu berupa rumah layak huni (RLH). Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat secara kasat mata dari keberadaan dan kepemilikan rumah yang layak, sehingga adanya rumah yang layak huni bagi masyarakat di suatu daerah dapat dijadikan salah satu barometer pengukur keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

Dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkalis terdapat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dibidang perumahan dan permukiman, yaitu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang di bangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu dengan melampirkan surat tanah atas nama calon penerima itu sendiri. Sumber anggaran dalam

Program Rumah Layak Huni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Jumlah dana pada pembangunan rumah layak huni sebesar Rp 45 juta sampai Rp 70 juta per unitnya, namun di beberapa daerah harga perunitnya bisa saja berbeda tergantung kondisi wilayah. Sedangkan untuk fisik bangunannya dibuat beton dengan tipe 36, berlantai keramik lengkap dengan kamar mandi, dan beratap seng.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun sebanyak 3.000 unit rumah yang dibangun secara berkelanjutan, sejak program ini dimulai tahun 2011 hingga 2014 RLH yang sudah dibangun dan diserahkan pada RTM (rumah tangga miskin) yang berhak menerimanya sebanyak 2.400 unit rumah atau 80 persen dari target 3000 unit rumah. Sedangkan sisanya yaitu berjumlah 600 unit dituntaskan pembangunannya pada tahun 2015. Dan adapun sumber dana pembangunan rumah layak huni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 kegiatan pembangun rumah layak huni direncanakan 600 rumah unit per tahun hingga 2021 mendatang. Namun pada tahun 2016 tidak terlaksana karena adanya kegiatan yang sama dengan provinsi (transisi) kemudian adanya rasionalisasi anggaran pada tahun 2017 dan 2018, dengan terhentinya pelaksanaan program bantuan rumah layak huni tentu jauh dari rencana awal yang diharapkan program ini terlaksana secara berkelanjutan

setiap tahunnya. Selanjutnya 600 unit rumah layak huni yang gagal di bangun tahun 2018 akan diluncurkan dan dibangun pada tahun 2019, dan juga menambah 600 unit rumah layak huni lagi yang akan dibangun pada 2019, jadi total keseluruhan 1200 rumah layak huni akan dibangun pada tahun 2019 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 95 Milyar. Dengan jumlah unit dan anggaran sebesar itu di harap kan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhannya akan tempat tinggal dan pemerataan pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Faktor faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian implementasi program rumah layak huni ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Rumah layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

2. KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Winarno, 2016 istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda, namun kebijakan merupakan definisi yang menekankan tidak hanya pada yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut **William N. Dunn** dalam (**Pasolong, 2014**) mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut (**Nugroho, 2017**) kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis

maupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategis, maka didalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat didalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi maka kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga bersifat negatif, didalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Kemudian menurut **Anderson** dalam (**Indiahono, 2017**) mendefenisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. **Kilpatrick** dalam (**Asra, 2014**) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat.

2.2 Implementasi

Winarno, 2014 mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Sedangkan **Van meter dan Van Horn** dalam

(Winarno, 2016) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan secara sederhana menurut (Agustino, 2016) dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. George Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

- a. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
- b. Resources, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
- c. Disposition, berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut.
- d. Bureaucratic fragmentation, berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih efektif.

2.3 Program

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, untuk menggambarkan kondisi implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau. Melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan di Kabupaten Bengkalis melalui berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang diperoleh dari informan yang tersedia. Sebagaimana diungkapkan

oleh Bagdan yang dikutip oleh moloeng (2004:3) “metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian implementasi Program Rumah Layak Huni ini berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menjadi titik fokus dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan di jalan Pramuka Desa Senggoro Kabupaten Bengkalis serta Waktu penelitian dimulai dari pada bulan Juni 2019 sampai sekarang.

3.3 Informan Penelitian

Dalam pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling, teknik ini merupakan teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi. Pertimbangan peneliti menggunakan teknik purposive sampling ini yaitu pemilihan partisipan yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan akan memudahkan peneliti menjelajah objek penelitian. Namun dalam pengambilan sampel kepada masyarakat penerima bantuan peneliti memakai teknik snowball sampling, yaitu teknik suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program rumah Layak huni.
- c. Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kecamatan Mandau.
- d. Tenaga Fasilitator Lapangan.
- e. Masyarakat yang menerima bantuan di Kecamatan Mandau.

3.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan instrument etnografer, etnografer adalah orang yang melakukan penelitian, menggali informasi dari informan dan tinggal dilapangan bersama subjek penelitian untuk mengumpulkan semua data dan menuliskannya dalam sebuah tulisan etnografi. Emzir (2011) mengatakan bahwa penelitian etnografi menggunakan tiga macam pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumen

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang muncul di dalam penelitian dan data ini akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan, beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Wawancara
Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban. Bertujuan mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,

kepedulian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

b. Observasi

Observasi non partisipatif (pasif), pada observasi nonpartisipatif ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan observer tetapi hanya melakukan pengamatan secara sepintas pada saat tertentu observer melakukan kegiatan. Pengumpulan data melalui data pengamatan atau observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi data wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa rekaman atau photo-photo yang dapat diartikan sebagai data yang dipersiapkan guna keperluan tertentu dan ini juga sebagai bukti pendukung dalam melakukan penelitian. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dan hasil lapangan dan keterangan secara tertulis, tergambar, terekam, tercetak. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti fisik dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yang meliputi:

1. Reduksi Data, dalam mereduksi data dilakukan proses pemilihan, merangkum, pemusatan perhatian, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan penyederhanaan data.

Data yang diperoleh lapangan jumlahnya sangat banyak dan kompleks, sehingga diperlukan reduksi data. Hanya data-data yang relevan dengan tujuan penelitian yang diambil, data dirangkum dan dipilih yang pokok-pokok saja, difokuskan pada data-data yang penting. Kemudian dicari tema dan polanya. Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data, setelah data direduksi, maka data selanjutnya disajikan, melalui penyajian data, data akan terorganisir dengan baik, tersusun pola hubungan sehingga mudah dipahami. Penyajian data dalam bentuk teks yang naratif. Penyajian berbentuk teks dan bersifat naratif merupakan salah satu ciri penelitian kualitatif.

4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi, peneliti sebagai instrument kunci penelitian melakukan interpretasi secara rasional atas data empiris yang dikumpulkan yang dikategorikan secara sistematis. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan mungkin berubah bila ditemukan bukti-bukti data yang mendukung. Verifikasi dilakukan atas informasi lisan maupun dokumentasi. Proses refleksi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh atas ucapan dan makna dibalik ucapan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan hubungan kausal atau

interaksi yang disajikan dalam bentuk deskripsi.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

5.1.1 Komunikasi

Dalam komunikasi Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Mandau yang terpenting adalah akses informasi. Dalam rangka akses penyebarluasan informasi dimaksudkan agar masyarakat dan organisasi-organisasi terkait dapat mengetahui program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Penyebarluasan dapat dilaksanakan melalui sosialisasi dengan organisasi terkait atau kelompok sasaran. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran dan terjadinya *miss* komunikasi antara kelompok sasaran dengan pihak pelaksana.

Dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari Dinas ke Kecamatan dan Kelurahan hingga dari Tim Fasilitator Lapangan kepada masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni.

5.1.2 Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab

untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis No 09 Tahun 2019. Dari segi anggaran pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah menyiapkan anggaran supaya program ini terlaksana setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala dan hambatan yang dihadapi.

5.1.3 Disposisi

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakteristik penting

yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asas program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam proses dasar penentuan penerima bantuan Program Rumah Layak Huni sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, penerima harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan kemudian, data yang telah diajukan oleh Camat berdasarkan usulan Desa atau Kelurahan kemudian diverifikasi oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan rumah layak huni yaitu :

1. Penduduk Kabupaten Bengkalis yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas.
3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya yang tidak layak huni.
4. Belum pernah memperoleh bantuan sebelumnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten Bengkalis.
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
7. Bersedia membuat pernyataan berikut:

- a. Bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan RLH.
- b. Bersedia mengikuti ketentuan kegiatan pembangunan RLH.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek sstruktur organisasi yang mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfregmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan yang berbentuk program harus mempunyai prosedur dan standar operasional agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau telah melaksanakan mekanisme dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan dari segi koordinasi yang telah dilakukan antara dinas, instansi dan pihak yang terkait sudah terlaksana dengan baik. Salah satu contoh koordinasi yang dilakukan dalam proses pencairan dana, pihak PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pemantauan pada saat pencairan dana dilapangan yang diterima oleh POKMAS dan

diperiksa oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan).

5.2 Fakto-Faktor Penghambat Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

5.2.1 Penyampaian Informasi

Diketahui bahwa petugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki kesulitan untuk bertemu langsung dengan penerima bantuan dikarenakan mereka tidak berada dirumah untuk bekerja diladang ataupun berdagang, dan kepala keluarga pemilik rumah tidak layak huni tidak berada dirumah pada pagi sampai sore hari berada diluar rumah untuk bekerja. Hal ini menjadi salah satu penghambat komunikasi untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan. Sehingga pihak Dinas harus bekerja lebih ekstra dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyalurkan bantuan rumah layak huni.

5.2.2 Sumber Daya Manusia

Diketahui bahwa ditinjau dari sumber daya manusia, kualitas implementor dalam hal ini fasilitator lapangan belum optimal dalam melaksanakan pendampingan kepada kelompok sasaran penerima bantuan RLH. Sehingga target yang ingin dicapai belum maksimal. Oleh sebab itu harapan dari masyarakat pendampingan dan pengawasan kegiatan harus lebih baik. Tenaga Fasilitator yang hanya berjumlah 1 orang perkecamatan juga menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

5.2.3 Anggaran

Program ini sempat terhenti pada tahun 2017-2018 dikarenakan rasionalisasi anggaran, hal ini tentu tidak sesuai dengan yang direncanakan akan terlaksana setiap tahunnya. Anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan sebuah program, karena jika tidak adanya anggaran maka proses pelaksanaan dalam sebuah program itu dapat terhenti. Dan dari segi mekanisme pencairan dana yang terlalu panjang dan bertahap sehingga dana yang turun ke desa tidak langsung 100% (seratus persen), sehingga menyulitkan dalam pembelian bahan material bangunan untuk proses pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

5.2.4 Mementingkan Kepentingan Kelompok

Dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dalam penentuan calon penerima bantuan. Salah satu masyarakat tidak mendapatkan bantuan padahal sudah mengajukan proposal sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Seperti halnya yang peneliti jumpai dan berdasarkan observasi dilapangan, terdapat masyarakat yang lebih membutuhkan dengan kondisi rumah yang terbilang sangat tidak layak untuk dihuni akan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Begitu sebaliknya, masyarakat yang kondisi rumahnya lebih bagus dan juga berpagar mendapatkan bantuan. Dan dari data yang peneliti sajikan terlihat bahwa masih terdapat masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah dan dengan jumlah tanggungan yang lebih banyak tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah

seharusnya tidak melakukan nepotisme atau lebih mementingkan kepentingan kelompok dalam penentuan penerima bantuan program rumah layak huni.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala dalam implementasinya yang harus diperbaiki. Seperti halnya dalam komunikasi yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan yang tidak menjangkau masyarakat penerima bantuan dirumahnya, hal ini juga disebabkan karena jumlah Tenaga Fasilitator Lapangan yang hanya berjumlah satu orang perkecamatan. Dan program ini sempat terhenti dikarenakan adanya devisa anggaran.

6.2 Saran

Sebelum turun kelapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat seharusnya Tim Melakukan Koordinasi terlebih dahulu supaya komunikasi berjalan dengan baik. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melakukan peningkatan sumber daya yaitu dari segi penambahan Tenaga Fasilitator lapangan sehingga perkecamatan menjadi 2 atau 3 orang. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan dana khusus supaya program ini tetap berjalan setiap tahunnya, dan diharapkan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam proses implementasi program rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari*

Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Adisasmita Raharjo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Agustino Leo. 2008. *Dasa Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Ahmadi Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rienika Cipta

Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rieneke Cipta

-----2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*.

Jakarta: Rieneke Cipta

Arsyad Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*. Salatiga: PT Gramedia Pustaka Utama

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media

Mardikonto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Narbuko cholid, Achmadi Abu. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara